

**ANALISIS KEBIJAKAN ADOPTI IPSAS SEBAGAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DALAM MENCAPAI KINERJA DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK YANG LEBIH BAIK : KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS**

Deka Chantika Savana Cinta¹, Rina Tjandrakirana^{2*}
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

***Corresponding Author:** rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id , dekachantika4@gmail.com

Abstrak

Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) telah menjadi kebijakan penting dalam reformasi administrasi keuangan negara guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak adopsi IPSAS terhadap administrasi keuangan negara dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IPSAS meningkatkan transparansi laporan keuangan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kredibilitas fiskal pemerintahan. Selain itu, IPSAS juga berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan publik, peningkatan daya saing ekonomi, serta pengurangan tingkat korupsi melalui sistem pencatatan berbasis akrual. Namun, implementasi IPSAS menghadapi tantangan seperti biaya transisi yang tinggi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari institusi pemerintah. Keberhasilan penerapan IPSAS sangat bergantung pada komitmen politik, regulasi yang mendukung, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengaplikasikan standar ini. Oleh karena itu, strategi implementasi yang matang dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar adopsi IPSAS dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi administrasi keuangan negara.

Kata Kunci: IPSAS, Administrasi Keuangan Negara, Akuntabilitas Publik, Kinerja Pemerintah, Kajian Literatur Sistematis

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

IPSAS adalah standar akuntansi yang diakui secara luas untuk pelaporan di sektor publik. Berbagai negara maju dan berkembang menggunakan IPSAS sebagai standar untuk merekam dan menerbitkan laporan keuangan tahunan perusahaan milik negara. Pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan sektor publik lainnya di seluruh dunia telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada standar akuntansi internasional perusahaan sektor publik, yang digambarkan sebagai standar internasional untuk sektor publik (IFAC, 2022). Pemerintah di seluruh dunia dianggap sebagai perwakilan dari orang-orang yang tentu saja transparan, transparan, bertanggung jawab atas manajemen yang akurat pada waktu yang baik (Obara et al., 2017). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan tahunan pemerintah sebagian besar ditentukan oleh standar akuntansi yang digunakan dalam persiapannya (Arnold, 2020).

Defisit fiskal yang tinggi dan ledakan utang global telah mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem akuntansi dalam beberapa tahun terakhir. Jaminan ketinggian berkualitas tinggi dianggap perlu bersama dengan kebutuhan untuk akuntabilitas sektor publik. Di tingkat internasional, penerapan Standar Akuntansi Internasional (IPSAS) di sektor publik adalah

faktor reformasi utama dalam kebijakan moneter di banyak negara untuk memastikan transparansi, peningkatan kualitas dan informasi keuangan komparatif dari berbagai negara (Evangelos Chytis et al., 2020). Penggunaan IPSAS memberikan pedoman untuk mengelola keuangan secara efektif dengan berbagai manfaat. Manfaat ini termasuk manajemen anggaran yang lebih ketat, transparansi dalam laporan keuangan tahunan, tugas akuntabilitas untuk tata kelola, pengukuran dan pemantauan kinerja, dan penghindaran keputusan yang memiliki dampak negatif pada efisiensi atau kesetaraan antargenerasi (Ball, 2015).

Berbagai hasil implementasi IPSAS termasuk menciptakan basis yang dibatasi untuk deteksi dan inklusi transaksi. Fondasi batas adalah cara untuk mencerminkan kegiatan ekonomi perusahaan daripada hanya dengan mempertimbangkan kegiatan ekonomi secara tunai. Berdasarkan batasan batas, transaksi dicatat ketika peristiwa ekonomi terjadi, terlepas dari transaksi dengan uang tunai (Nia Pramita Sari, 2024). Beberapa penelitian mendukung penggunaan sistem berbasis batas, sebagaimana dinyatakan dalam IPSAS bahwa fondasi batas dapat meningkatkan transparansi (Boxall, 1998; Denis, 1993; Microlef, 1994; dan Wong, 1998) (Evans, 1995; Webster, 1998). Namun, beberapa penelitian lain telah menyajikan bukti empiris bahwa laporan keuangan yang disajikan pada basis batas dapat menyesatkan pengguna karena penggunaan basis batas gagal mencapai manfaat yang diterapkan sebelumnya (McCrae & Aiken, 2000; Vinnari & Näsi, 2008). Ini menggambarkan kegagalan keseluruhan IPSAS di negara - negara Asia Selatan (Salah et al., 2018; Adhikari et al., 2015).

Penelitian Pencetakan Terbaru Kebutuhan untuk mengejar pendekatan lokal dan partisipatif tambahan untuk reformasi sektor publik di negara -negara berkembang, alih -alih mempromosikan teknik akuntansi spesifik (Lassou et al., 2018; Murding et al., 2018) khususnya akuntansi dan akuntansi IPSAS, di negara -negara Barat.

Literatur Review

Standar Akuntansi Pemerintahan Secara Global

Standar akuntansi pemerintahan di tingkat global telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Salah satu standar yang banyak digunakan adalah *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya lebih transparan, akurat, dan dapat diperbandingkan secara internasional. IPSAS disusun oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB), yang beroperasi di bawah naungan *International Federation of Accountants* (IFAC) di New York. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya pemerintah.

Di tingkat global, IPSAS telah diadopsi oleh berbagai organisasi internasional dan negara, termasuk Uni Eropa, Dewan Eropa, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Dunia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Chytis et al., 2020). Implementasi IPSAS oleh organisasi dan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa standar ini diakui sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan publik. Studi yang dilakukan oleh (Adhikari & Mellemyck, 2010) menunjukkan bahwa di Asia Selatan, banyak negara menerapkan standar akuntansi untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, beberapa negara memilih untuk tidak sepenuhnya mengadopsi IPSAS, melainkan hanya mengambil aspek-aspek tertentu yang disesuaikan dengan sistem akuntansi nasional mereka.

Meskipun demikian, standar internasional seperti IPSAS tetap berperan dalam memperkuat disiplin pelaporan keuangan di negara berkembang. Seperti yang dikemukakan

oleh (Cai et al. 2014) dan (Houqe & Monem, 2016), IPSAS tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan struktur kelembagaan, memperkuat transparansi fiskal, serta memperbaiki tata kelola keuangan negara. Dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi IPSAS, standar ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam reformasi akuntansi pemerintahan secara global, guna mewujudkan administrasi keuangan negara yang lebih akuntabel dan terpercaya.

Penerapan Adopsi IPSAS sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dalam sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik melalui sistem akuntansi berbasis akrual. IPSAS berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan penyusun standar akuntansi nasional dalam mengembangkan atau menyesuaikan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Dengan menerapkan infrastruktur akuntansi berbasis akrual, keputusan pemerintah dapat lebih akurat karena didasarkan pada kejadian ekonomi yang nyata, bukan sekadar pencatatan arus kas masuk dan keluar (Rohman et al., 2019).

Meskipun IPSAS banyak diadopsi secara global, beberapa studi menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan penyimpangan. (Polzer et al, 2022) mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam penerapan IPSAS, antara lain keterbatasan cakupan standar dalam menangani akuntansi sektor publik secara menyeluruh, kelemahan dalam spesifikasi standar yang memungkinkan interpretasi yang berbeda, serta perlunya penyesuaian terhadap kematangan dan integritas sistem akuntansi di masing-masing negara. Selain itu, IPSAS tidak secara eksplisit mengakomodasi beberapa aspek spesifik dalam akuntansi sektor publik, seperti pengelolaan tunjangan sosial, pensiun, dan warisan. Hal ini menyebabkan beberapa negara harus melakukan deviasi atau modifikasi agar standar ini dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Selain keterbatasan teknis, terdapat juga tantangan dalam aspek administrasi dan regulasi. Beberapa negara mengalami konflik antara IPSAS dengan standar akuntansi nasional yang sudah lama digunakan, sehingga menimbulkan resistensi terhadap perubahan, baik dari pemerintah maupun institusi terkait. Selain itu, karena IPSAS terus mengalami perkembangan, terdapat kesenjangan antara standar internasional dan kebijakan nasional, yang menyebabkan penyimpangan dalam implementasinya. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya insentif bagi pemerintah untuk mengadopsi IPSAS sepenuhnya. Berbeda dengan sektor swasta yang memiliki tekanan dari kreditor dan investor untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sebanding, sektor publik cenderung tidak menghadapi tuntutan yang sama, sehingga adopsi IPSAS sering kali tidak menjadi prioritas utama.

Dari segi ekonomi, penerapan IPSAS juga dianggap memiliki biaya yang tinggi. Transisi dari sistem berbasis kas ke sistem akrual memerlukan investasi besar dalam hal infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta penyesuaian kebijakan dan regulasi. Beberapa negara menolak implementasi IPSAS karena dinilai tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh, terutama bagi negara-negara dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Akibat dari berbagai kendala tersebut, banyak negara dan organisasi internasional hanya menerapkan IPSAS secara parsial atau mengadopsi standar tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional mereka (Grossi & Steccolini, 2015). Contohnya, beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Eropa menggunakan prinsip-prinsip IPSAS sebagai panduan dalam menyusun kebijakan akuntansi, tetapi tidak sepenuhnya menerapkan semua standar yang ada. Oleh karena itu, meskipun IPSAS memiliki potensi besar

dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan setiap negara dalam mengatasi hambatan implementasi serta menyesuaikan standar ini dengan sistem administrasi yang sudah ada.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi literatur terkait Kebijakan Adopsi IPSAS Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Administrasi Keuangan Negara. Data yang dikumpulkan berasal dari jurnal akademik yang terindeks dalam Scopus, Web of Science, dan SINTA dengan fokus pada penelitian yang menggambarkan pemerintah dari berbagai negara dalam penerapan adopsi IPSAS Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perencanaan Tinjauan Literatur

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam melakukan tinjauan sistematis. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan adopsi IPSAS Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan secara global. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

RQ1: Bagaimana kebijakan adopsi IPSAS di berbagai negara memengaruhi kinerja dan akuntabilitas publik dalam administrasi keuangan negara?

RQ2: Apakah penerapan adopsi IPSAS berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi terhadap administrasi keuangan negara?

Pelaksanaan Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini, dilakukan pencarian literatur dengan kata kunci spesifik untuk menemukan studi yang relevan. Pencarian dilakukan melalui database akademik terkemuka, seperti Scopus dan SINTA. Kriteria inklusi (IC) berikut memungkinkan SLR untuk digunakan:

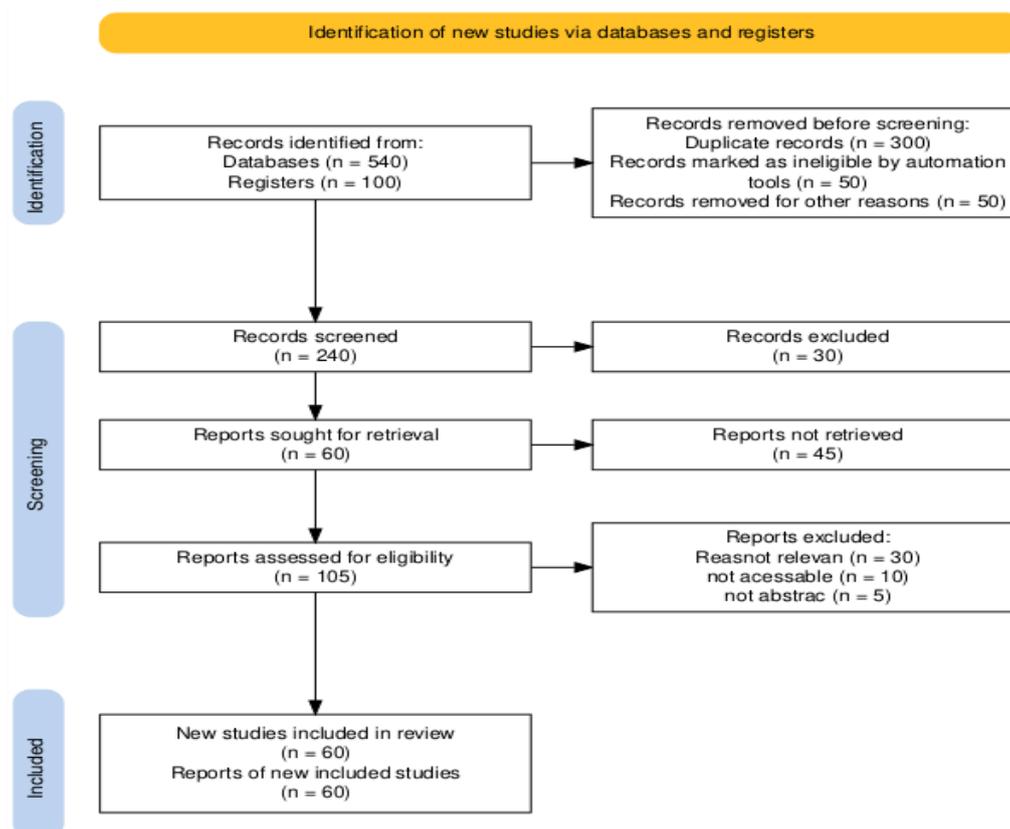
- 1) Artikel yang membahas adopsi IPSAS sebagai standar akuntansi sektor publik internasional.
- 2) Studi yang dipublikasikan dalam jurnal yang terindeks Scopus, Web of Science, atau SINTA.
- 3) Artikel yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi yang sesuai dengan analisis rantai pasokan.
- 4) Artikel yang tersedia dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Review jurnal dibuat menggunakan pencarian berikut: "*Systematic review of IPSAS standards*", "*The Effect of IPSAS Adoption*," "*Implementation of the international public sector accounting standards in Europe*", AND "*Implementation of the international public sector accounting standards in ASEAN*". Kemudian, pada tahap ini teridentifikasi 640 artikel berdasarkan Judul, Abstrak dan Kata Kunci yang telah digunakan. Artikel yang mengandung kata kunci pada judul, abstrak atau teks lengkap dan dapat diakses.

Pelaporan Tinjauan Pustaka

Data dikumpulkan secara manual melalui pendekatan analisis yang mencakup sejumlah elemen seperti jenis artikel, nama penulis, judul, tahun publikasi, negara penelitian, objek penelitian, teori yang digunakan, variabel penelitian, metode penelitian, serta hasil penelitian terkait kebijakan adopsi IPSAS sebagai standar sektor publik internasional. Penjelasan lebih rinci mengenai proses SLR dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Prisma



Data dikumpulkan secara sistematis menggunakan *software Publish or Perish (PoP)*, dengan scopus dan google scholar sebagai basis data yang dipilih. Terdapat 640 artikel yang dapat diidentifikasi berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang telah digunakan. Metode seleksi ini menghasilkan 60 literatur yang membahas mengenai kebijakan adopsi IPSAS sebagai standar sektor publik internasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman lebih komprehensif terkait Kebijakan Adopsi IPSAS Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Administrasi Keuangan Negara yang dimoderasi oleh ekonomi, maka peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Hasil tinjauan literatur ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur

Negara	Peneliti	Hasil
Pengaruh Kebijakan Adopsi IPSAS Sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan		

Indonesia	(Obara et al, 2017), (Rohana Maqqliyan, 2022), (Kun Ismawati, 2015), (Asri et al, 2023) (Iciah et al, 2024), (Rani Fibriani & Deviani, 2024), (Rochman Marota & Razana Juhaida Johari, 2024), (Setyawan et al, 2023), (Inata et al, 2022), (Dina Natasari & Rizky Wulandari, 2018)	+
Austria	(Schmidhuber et al, 2020)	+
Nigeria	(Obara et al, 2017), (Ven Prof JK Onuora, 2024)	+
Tunisia	(Fatma Ben Slama, 2024), (Yosra Mnif, 2020)	+
Yunani	(Chytis et al, 2020)	+
Irlandia	(Vincent Tawiah, 2022) (Vincent Tawiah, 2021)	+
Malaysia	(Iciah et al, 2024),	+
Eropa	(Ghina Adhha Haura & Ella Rahmayanti, 2024)	+
Eropa	(Polzer et al, 2022)	+/-
Uni Eropa	(Isabel Brusca & Juan Carlos Martínez, 2016)	+
Amerika	(Isabel Brusca & Juan Carlos Martínez, 2016), (Amiri et al, 2020)	+
Maroko	(Yassin et al, 2024)	+
Rumania	(Iliea et al, 2012)	+
Afrika	(Amiri et al, 2020)	+
Indonesia	(Nia Pramita Sari, 2024)	-
Afrika	(Chatti et al, 2024)	-
Moderasi Ekonomi		
Indonesia	(Rochman Marota & Razana Juhaida Johari, 2024)	+
Indonesia	(Nia Pramita Sari, 2024)	-
Indonesia	(Isabel Brusca & Juan Carlos Martínez, 2016)	+/-

Keterangan:

+ = Berpengaruh Positif

- = Berpengaruh Negatif

+/- = Berpengaruh positif dan negatif/Tidak ditemukan hubungan yang signifikan

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Adopsi IPSAS Terhadap Administrasi Keuangan Negara

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menjadi kebijakan yang semakin banyak diadopsi oleh berbagai negara sebagai bagian dari reformasi administrasi keuangan negara. (Hughes, 2013) mengemukakan bahwa penerapan IPSAS di negara-negara berkembang sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan. Dengan menyediakan informasi keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, serta dapat diperbandingkan, IPSAS memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan legislatif, warga negara, media, serta lembaga donor internasional dan multilateral. Pihak donor dan pemberi pinjaman internasional melihat

IPSAS sebagai instrumen penting dalam reformasi akuntansi publik, karena penerapan standar ini, khususnya berbasis akrual, diyakini dapat menjamin integritas keuangan suatu negara (Chatti et al., 2024). Oleh karena itu, organisasi internasional yang memberikan bantuan keuangan sering kali mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi IPSAS sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas administrasi keuangan negara (Chan, 2008).

Dalam implementasinya, negara-negara Anglo-Amerika umumnya telah mengadopsi akuntansi berbasis akrual secara penuh, yang sesuai dengan persyaratan IPSAS. Langkah ini sejalan dengan reformasi Manajemen Publik Baru (*New Public Management*), yang menekankan pentingnya laporan keuangan berbasis akrual bagi pemerintah (Pina & Torres, 2003). Sementara itu, di negara maju seperti Inggris, alasan utama penerapan IPSAS adalah karena kesesuaiannya dengan standar pelaporan keuangan internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) (Pilcher, 2011; Bruscan et al., 2013).

Adopsi IPSAS juga semakin berkembang di negara-negara berkembang, seperti di Amerika Latin, di mana Kolombia dan Chili telah menerapkan standar ini guna memodernisasi sistem akuntansi pemerintahan serta meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan (Bruscan et al., 2013). Di negara-negara tersebut, sistem akuntansi berbasis akrual yang mengikuti IPSAS tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga dianggap sebagai alat dalam upaya pencegahan korupsi (Christiaens et al., 2014).

Dampak kebijakan adopsi IPSAS terhadap administrasi keuangan negara terlihat dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. (Bellanca, 2014) menegaskan bahwa IPSAS berkontribusi terhadap perbaikan kualitas informasi akuntansi di sektor publik, sementara (Bastida & Benito, 2007) menunjukkan bahwa standar ini memungkinkan pengakuan transaksi ekonomi secara lebih tepat waktu tanpa harus bergantung pada arus kas. Dengan demikian, warga negara dapat menilai kinerja pejabat pemerintahan tidak hanya berdasarkan peristiwa kas masuk dan keluar, tetapi juga dengan melihat kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kejelasan dan transparansi yang dihasilkan oleh sistem IPSAS ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi korupsi dalam administrasi keuangan negara.

Lebih lanjut, IPSAS juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, sekaligus mengurangi kemungkinan oportunistik politik, korupsi, serta praktik penipuan (Torres, 2004). Studi yang dilakukan oleh (Cuadrado-Ballesteros et al. 2019) terhadap 33 negara anggota OECD menunjukkan bahwa adopsi IPSAS dan akuntansi berbasis akrual berkorelasi dengan penurunan tingkat korupsi. Peningkatan transparansi akibat penerapan IPSAS melemahkan keunggulan informasi yang dimiliki politisi dibandingkan dengan publik, sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dalam administrasi keuangan negara. Namun, studi ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi karena hanya mencakup negara-negara OECD yang umumnya sudah maju dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dengan negara-negara berkembang.

Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi internasional seperti IPSAS dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin dalam pelaporan keuangan negara. (Bellanca, 2014) menekankan bahwa IPSAS dapat menjadi alat tambahan dalam meningkatkan kualitas administrasi keuangan negara, terutama di negara-negara yang memiliki kelembagaan publik yang masih lemah. Perbedaan kualitas kelembagaan antarnegara memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana struktur pemerintahan memengaruhi manfaat IPSAS dalam reformasi administrasi keuangan. Mengingat bahwa penelitian sebelumnya (Cuadrado-Ballesteros et al., 2019)

menunjukkan bahwa IPSAS efektif dalam mengurangi korupsi di negara maju yang memiliki struktur sipil dan publik yang kuat, diharapkan bahwa dampak positif IPSAS dalam meningkatkan kualitas administrasi keuangan negara akan lebih signifikan di negara berkembang yang memiliki kelembagaan pemerintahan yang baik.

Keberhasilan kebijakan adopsi IPSAS dalam meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas

Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) menjadi langkah strategis dalam reformasi administrasi keuangan publik di berbagai negara. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan sistem ini, informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih akurat, dapat dibandingkan, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah.

Keberhasilan penerapan IPSAS telah terlihat di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Di Afrika, implementasi IPSAS telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual, negara-negara yang mengadopsi IPSAS dapat menyediakan laporan keuangan yang lebih jelas, andal, dan dapat dibandingkan secara internasional (Chatti et al., 2024). Di Eropa, penelitian (Polzer et al. 2022) menunjukkan bahwa penerapan IPSAS telah mendorong peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan pencatatan yang lebih akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi pemborosan anggaran, sehingga meningkatkan kinerja keuangan publik secara keseluruhan.

Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi, adopsi IPSAS juga memperkuat kredibilitas fiskal suatu negara. Studi yang dilakukan oleh (Onuora & Uche, 2024) mengenai implementasi IPSAS di Nigeria menunjukkan bahwa transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan pemerintah telah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan negara. Kepercayaan ini berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemudahan akses terhadap pendanaan internasional.

Meskipun IPSAS memberikan banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. (Obara & Nangih, 2017) mencatat bahwa hambatan utama dalam adopsi IPSAS meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, biaya implementasi yang tinggi, serta resistensi dari institusi pemerintah yang belum sepenuhnya siap beralih ke sistem berbasis akrual. Namun, penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan IPSAS umumnya memiliki dukungan politik yang kuat, regulasi yang jelas, serta program pelatihan SDM yang memadai. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan implementasi menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini. Jika diterapkan dengan strategi yang tepat, IPSAS dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan negara, sehingga mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, IPSAS juga berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (Christiaens et al. 2015) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode akuntansi berbasis akrual, pemerintah dapat mencatat aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya secara lebih akurat dibandingkan dengan sistem berbasis kas. Peningkatan validitas dan reliabilitas laporan keuangan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data serta meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal.

Lebih jauh, keberhasilan kebijakan adopsi IPSAS juga berdampak pada daya saing ekonomi suatu negara. Dari penelitian (Müller-Marqués Berger, 2018), negara-negara yang telah menerapkan IPSAS mengalami peningkatan daya saing global, karena laporan keuangan yang lebih transparan dan sesuai standar internasional meningkatkan kepercayaan investor

serta mempermudah akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan global, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

Selain itu, implementasi IPSAS juga berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan publik. (Brusca & Martínez, 2016) menekankan bahwa standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat proses audit, pengawasan anggaran, serta pengelolaan risiko fiskal. Dengan mekanisme akuntansi yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih baik, stabilitas keuangan jangka panjang dapat terjaga dengan lebih efektif. Di sisi lain, IPSAS juga memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan publik. (Hepworth, 2017) menyatakan bahwa dengan informasi keuangan yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Transparansi dalam data keuangan memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien, mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan intervensi, serta mengurangi ketidakefisienan dalam pengeluaran publik.

Lebih lanjut, IPSAS juga berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. (Lassou, 2017) menemukan bahwa penerapan IPSAS membantu mengurangi tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya sistem akuntansi yang lebih transparan, praktik penyalahgunaan dana publik menjadi lebih sulit dilakukan, karena setiap transaksi keuangan tercatat dengan jelas dan dapat diaudit secara independen. Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan adopsi IPSAS dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan publik tidak hanya tercermin dalam transparansi dan efisiensi, tetapi juga dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing ekonomi, serta pencegahan korupsi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, faktor kunci keberhasilannya tetap bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur, serta pelatihan dan kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan standar ini secara efektif. Dengan demikian, adopsi IPSAS yang dijalankan dengan strategi yang matang akan membawa manfaat besar dalam memperbaiki administrasi keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dalam administrasi keuangan negara telah menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Penerapan IPSAS berbasis akrual memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas fiskal, serta mempermudah akses ke pendanaan internasional. Selain itu, standar ini juga berkontribusi dalam memperbaiki sistem audit, memperkuat tata kelola keuangan publik, serta mencegah praktik korupsi. Namun, implementasi IPSAS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya transisi yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, resistensi dari institusi pemerintah, serta kesiapan infrastruktur dan regulasi yang belum optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat komitmen politik dengan menyusun regulasi yang jelas dan selaras dengan IPSAS, serta memastikan setiap instansi pemerintah memiliki panduan yang terstruktur dalam penerapannya. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui program pelatihan intensif dan sertifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, serta memasukkan IPSAS dalam kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik.

Strategi implementasi bertahap juga dapat diterapkan agar transisi ke IPSAS berjalan lebih efektif, dengan memulainya dari instansi yang memiliki kesiapan lebih baik sebelum diperluas ke seluruh lembaga pemerintahan. Di samping itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan sistem informasi akuntansi yang kompatibel dengan IPSAS, guna mendukung pencatatan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Kolaborasi dengan lembaga

internasional seperti IFAC, IMF, dan Bank Dunia juga menjadi langkah strategis untuk memperoleh pendampingan teknis, akses pendanaan, serta pembelajaran dari negara-negara yang telah berhasil mengadopsi IPSAS. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap IPSAS, dengan membangun mekanisme audit yang ketat serta sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengidentifikasi kendala dalam implementasi dan mencari solusi yang tepat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi IPSAS, manfaatnya dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik sangat signifikan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, IPSAS dapat menjadi instrumen utama dalam reformasi administrasi keuangan negara guna mencapai tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, N. (2020) "Accountability in transnational governance: The partial organization of voluntary sustainability standards in long-term account giving." *Regulation and Governance*, vol. 14, no. 4, pp. 733-746.
- Ball, I. 2015. Debate: Would IPSAS help Greece?. *Public Money Management*, 35(6), 397-398.
- Boxall, P. (1998). *The Revolution in Government Accounting*. Australian CPA (April).
- Chytis, E., Georgopoulos, I., Tasios, S., & Vrodou, I. (2020). *Accounting Reform and IPSAS Adoption in Greece*. *European Research Studies Journal*, 23(4), 165-184.
- Dennis, J. (1993). *Financial Reporting by the Government in Canada*. CMA Magazine (November).
- Evans, M. (1995). *A Change for the Better? Accountancy*, 115.
- IFAC (2022) Retrieved from <https://www.ifac.org/>
- McCrae, M., & Aiken, M. (2000). Accounting for infrastructure service delivery by Government: Generational issues. *Financial Accountability and Management*, 16(3), 265-287.
- Micallef, F. (1994). *A New Era in Reporting by Government Departments*. Australian Accountant (March).
- Obara, L. C., & Nangih, E. (2017). *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Adoption and Governmental Financial Reporting in Nigeria: An Empirical Investigation*. *Journal of Advances in Social Science and Humanities*, 3(1). DOI: [10.15520/jassh301184](https://doi.org/10.15520/jassh301184).
- Onuora, J. K., & Uche, A. A. (2024). *Effect of IPSAS Adoption as An Accountability Tool on Nigeria's Public Financial Management*. *Journal of Accounting and Financial Management*, 10(9), 119-136. DOI: [10.56201/jafm.v10.no9.2024.pg119.136](https://doi.org/10.56201/jafm.v10.no9.2024.pg119.136).

- Sari, N. P. (2024). *Evaluasi Kebijakan Adopsi IPSAS di Indonesia: Sebuah Kajian Empirisme. Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 47(1), 42-57.
- Wong, S. (1998). Full Speed Ahead- How to Move Forward Full Accrual Accounting for Capital Assets. *CMA Magazine* (October).